1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   Pada Triwulan III Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melaksanakan pemantauan terhadap perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya, serta jasa sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat.

   Perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting di Kabupaten Manggarai Barat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain ketersediaan pasokan dari daerah produsen, kondisi produksi dan musim panen, biaya transportasi dan distribusi,

   Risiko ke depan yang perlu diantisipasi meliputi kemungkinan kenaikan harga komoditas pangan strategis akibat keterbatasan pasokan, perubahan cuaca, peningkatan biaya angkutan dan distribusi, serta meningkatnya permintaan masyarakat pada hari besar keagamaan seperti Natal dan Tahun Baru

   Risiko lainnya adalah ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, yang dapat menyebabkan kenaikan harga apabila terjadi gangguan transportasi atau keterlambatan distribusi.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

   Dalam pelaksanaan pengendalian inflasi daerah pada Triwulan III Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting:

   1.Ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah

   2. Fluktuasi harga komoditas pangan strategis seperti: harga beras premium, cabai dan bawang putih dan fluktuasi tersebut di pengaruhi oleh ketidakseimbangan pasokan dan permintaan

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

   Pada Triwulan III Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan kebijakan pengendalian inflasi secara terkoordinasi melalui sinergi antarperangkat daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, distributor, serta pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, menjamin ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah mengacu pada strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan III Tahun 2026, evaluasi kebijakan pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Manggarai Barat dilaksanakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi

Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan perkembangan harga komoditas pangan strategis, kondisi ketersediaan stok, kelancaran distribusi barang

Pelaksanaan evaluasi juga diarahkan untuk mengidentifikasi kendala dan merumuskan langkah perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi pada triwulan berikutnya.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil pemantauan perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, identifikasi permasalahan, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah pada Triwulan III Tahun 2026 maka diperlukan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Manggarai Barat merekomendasikan beberapa kebijakan:

1. Memperkuat pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting

2. Mengoptimalkan pelaksanaan operasi pasar dan gerakan pangan murah apabila ada kenaikan harga bahan pangan kebutuhan pokok dan barang penting.

3. Melakukan kerja sama dengan daerah surplus pangan demi menjaga stabilitas pasokan pasokan

4. Memperkuat koordinasi dan sinergi antara sesama anggota TPID dan stakeholders terkait